

**Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya
Indralaya**

**Peranan Audit Investigasi Sebagai Alat Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dalam Rangka Memberantas Korupsi untuk
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih
(*Good and Clean Government*)**



SKRIPSI

Oleh :

Zulfahmi Hidayat

0199313005

**Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
2006**

657.4507
Hid
P
C-060361
2006

**Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya
Indralaya**



**Peranan Audit Investigasi Sebagai Alat Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dalam Rangka Memberantas Korupsi untuk
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih
(*Good and Clean Government*)**



R.13973/14334

SKRIPSI

Oleh :

Zulfahmi Hidayat

0199313005 5

**Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
2006**

Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya
Indaralaya
2006

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Zulfahmi Hidayat
NIM : 01993130055
Jurusan : Akuntansi
M. Kuliah : Pemeriksaan Akuntansi
Judul : Peranan Audit Investigasi Sebagai Alat Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dalam Rangka Memberantas Korupsi untuk
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih (*Good and Clean
Government*)

Tanggal : 14 Februari 2006

Ketua Panitia:



Dra. Hj. Kencana Dewi, Msc, Ak

Tanggal : 14 Februari 2006

Anggota Panitia



Aspahani, SIF, MM, Ak

"Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti ?" (QS. Az-zumar: 9)

"You're what you think (Anonim)

"My word is my bond (Anonim)

Dedicated to:

- *My Big Family*
- *Semua orang yang telah dan selalu hadir dalam hati dan pikiranku dan telah mewarnai kehidupanku*

Kata Pengantar

Assalamualaikum wr wb

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya lah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Tak lupa salawat serta salam disampaikan kepada junjungan serta *uswah* serta tauladan bagi kita semua, nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Syamsulrizal AK, sebagai dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
2. Ibu Dra. Hj. Kencana Dewi, Msi, Ak, sebagai dosen pembimbing utama yang telah memberikan arahnya dalam skripsi ini
3. Bapak Aspahani, SE, MM, Ak, sebagai dosen pembimbing kedua yang telah membantu dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Rochmawati Daud SE, Ak sebagai dosen tamu penguji
5. Ibu Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, sebagai ketua jurusan akuntansi yang sudah teramat baik kepada para mahasiswanya.
6. Bapak Drs. Ubaidillah, MM, Ak, sebagai dosen pembimbing akademik yang telah sudi memberikan tandatangannya di KRS-KRS ku.
7. Bapak Cris Kuntadi, AK, yang telah memberikan literature-literturnya dan bahan-bahan bacaan lainnya.
8. Kedua orangtuaku dan kedua kakak dan kakak iparku yang tak henti-hentinya memompa dan memberikan semangat dan mendoakan kesuksesanku. Juga untuk kedua keponakanku yang manis dan lucu yang menghiburku dikala jenuh.
9. Yuk Aliyah, terima kasih atas kerjasama dan hubungan baiknya selama ini.
10. Seluruh dosen-dosen fakultas ekonomi dan jurusan akuntansi khususnya yang telah sudi memberikan ilmu dan pengalamannya dan semoga ilmu yang telah diberikan berkah. .

11. Seluruh karyawan dan karyawan di fakultas ekonomi, terima kasih atas segala keakraban dan bantuannya.
12. Seluruh kawan-kawan seangkatan serta kakak dan adik tingkat di fakultas ekonomi dan jurusan akuntansi khususnya.
13. Rekan-rekan dan adik-adik seperjuangan yang ada di DPMU, UKM Nadwah, BO Ukhuwah dan IMA, terus dan tetap berjuang untuk kebaikan organisasi yang kita cintai.
14. Seluruh saudara-saudara dan keluarga besarku yang telah mendoakan dan mensupportku agar selesainya skripsi ini.
15. Serta seluruh pihak-pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah ikut mengantarkan penulis menjadi seorang sarjana.

Akhir kata penulis berharap skripsi yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalam

Indralaya, Februari 2006

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kerangka Teoritis	6
1.6 Metodologi Penelitian	7
1.7 Sistematika Penulisan	7
Bab II Landasan Teori	9
2.1 Pengertian Umum Audit Investigasi	9
2.2 Dasar Audit Investigasi	11
2.3 Prinsip-Prinsip dan Pendekatan Audit Investigasi	12
2.4 Syarat-Syarat dan Kompetensi Seorang Auditor Investigasi	14
2.5 Metodologi Penelitian Audit Investigasi	15
2.5.1 Penalahan Informasi Awal	18
2.5.1.1 Sumber Informasi	18
2.5.1.2 Teknis Pelaksanaan Informasi Awal	19
2.5.1.3 Pengembangan Informasi Awal	21
2.5.1.4 Hasil Telaahan Atas Informasi Awal	22
2.5.2 Perencanaan Pemeriksaan Investigatif	23
2.5.2.1 Standar Perencanaan Audit Investigasi	24
2.5.2.2 Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Audit	24
2.5.2.3 Penentuan Tim Audit Investigasi	26
2.5.2.4 Analisa Kebutuhan dan Penentuan Peralatan Pendukung	26
2.5.2.5 Penentuan Biaya dan Jangka Waktu Pelaksanaan	27
2.5.2.6 Penyusunan Program Audit Investigasi	27
2.5.3 Pelaksanaan Audit Investigasi	28

2.5.3.1	Standart Pelaksanaan Audit Investigasi	28
2.5.3.2	Pembicaraan Pendahuluan	29
2.5.3.3	Pelaksanaan Program dan Teknik-teknik Audit Investigasi	30
2.5.3.4	Bukti Audit Investigasi, Pengumpulan dan Pendokumentasiannya	34
2.5.3.5	Pengendalian Oleh Pengawas (SUPERVISOR)	35
2.5.3.6	Konsultasi Aspek Hukum Atas Hasil Audit	37
2.5.4	Pelaporan Audit Investigasi	37
2.5.4.1	Standart Pelaporan Audit Investigasi	38
2.5.4.2	Bentuk dan Susunan Laporan Hasil Audit Investigasi	39
2.5.5	Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi	43
2.5.5.1	Auditor Investigasi Sebagai Saksi Ahli	44
2.6	Tugas, Kewajiban dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan	49
2.7	Lingkup Pemeriksaan BPK	50
2.8	Tindak Pidana Korupsi	52
2.8.1	Pasal KUHP yang Berkaitan dengan Pidana Korupsi	56
2.9	Pemerintahan yang Bersih (<i>Good and Clean Government</i>)	62
Bab III Analisa dan Pembahasan		65
3.1	Sebab Dasar Adanya Tindak Pidana Korupsi	65
3.1.1	Kesejahteraan PNS yang Rendah	65
3.1.2	Kesempatan yang Terbuka Karena Lemahnya Sistem	67
3.2	Sebab Kurang Berhasilnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	68
3.2.1	Kurangnya Bukti Tindak Pidana Korupsi	70
3.2.2	Kurangnya Kompetensi Penyidik	72
3.2.3	Kurangnya Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi	72
3.3	Audit Investigasi Salah Satu Solusi Kurang Berhasilnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	73

Bab IV Kesimpulan dan Saran	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	77
Daftar Pustaka	79

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang bersih merupakan keinginan dari semua elemen bangsa yang ada di negara ini. Terlebih lagi setelah munculnya gerakan reformasi yang telah menumbangkan rezim yang telah berkuasa selama 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya, dan dianggap amat banyak kekotorannya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bukanlah langkah yang mudah semudah membalikan telapak tangan ataupun juga bukan sulap yang bisa dilakukan dengan kata simsalabim, melainkan suatu langkah besar yang memerlukan suatu proses yang memakan waktu. Dan salah satu langkah besar tersebut ialah melakukan pemberantasan korupsi yang ternyata merupakan salah satu penyakit yang sudah mengakar jauh di dalam tubuh masyarakat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan salah satu alat pemerintah yang dapat melakukan dan mempunyai wewenang untuk memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah dan BUMN/BUMD.

Untuk melakukan sesuatu diperlukanlah alat untuk melakukannya, maka untuk memberantas tindak pidana korupsi ini maka BPK menggunakan alatnya yaitu audit investigasi.

Audit investigasi walaupun bukan barang baru lagi bagi para akuntan terutama para auditor pemerintah, namun namanya akhir-akhir ini sering menghiasi media massa setelah terungkapnya kasus korupsi yang di terjadi di KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Setelah terbongkarnya kasus KPU maka permintaan terhadap audit investigasi pun banyak, mulai dari tentang dana gerakan reboisasi hutan (Gerhan), penyelewengan anggaran yang terjadi di departemen-departemen seperti departemen agama dan departemen lainnya, serta berbagai kasus korupsi yang terjadi di berbagai pemerintahan daerah baik yang dilakukan oleh oknum eksekutif maupun yang dilakukan oleh oknum legislatif hingga kasus yang terbaru mengenai penyelundupan berton-ton BBM (Bahan Bakar Minyak) dan penyelewengan dana subsidi BBM yang dilakukan oleh oknum pegawai Pertamina.

Selama pemerintah dan kita semua tetap menginginkan pemerintahan yang bersih dari korupsi sesuai dengan amanat dari reformasi yang telah merenggut nyawa mahasiswa-mahasiswa pilihan maka audit investigasi akan terus berkembang menuju arah yang lebih baik dari saat ini.

Mengungkapkan dan menemukan segala bentuk ketidakwajaran yang terjadi di instansi-instansi pemerintahan, BUMN/BUMD merupakan salah satu tugas utama dari BPK maka audit investigasi merupakan alat untuk mengungkapkan hal tersebut. Kalau boleh di ibaratkan dengan seorang tukang kayu maka audit investigasi merupakan gergaji dan palu yang diperlukan oleh tukang tersebut untuk dapat membuat suatu perabotan rumah tangga. Sehingga audit investigasi merupakan suatu keniscayaan bagi BPK dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi

Setiap pekerjaan itu selalu ada tantangan atau kendalanya begitu pula dengan audit investigasi ini. Kendala yang pertama dan utama ialah dari dalam pelaksanaannya yaitu BPK dimana keistiqomahan para auditor pemerintah ini masih banyak dipertanyakan orang, hal ini karena terungkapnya dimana oknum dari

BPK tidaklah melaksanakan tugas yang di bebaskan oleh negara ke pundaknya dengan sebagai mana mestinya sehingga kecurangan yang terjadi seolah-olah tidak ditemui, ataupun para oknum BPK ini mendapatkan uang atau fasilitas yang sebenarnya bukan merupakan hak mereka dari klien yang di periksanya.

Kendala yang kedua ialah susahnya mengungkap kecurangan yang terjadi jika kecurangan tersebut di lakukan secara bersama-sama (kolusi) dari level yang paling bawah sampai yang paling atas. Karena mereka satu sama lain akan saling melindungi kawannya dan semua bukti-bukti di buat sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak terjadi kecurangan. Jika hal ini yang terjadi maka para auditor itu harus berupaya keras untuk memutus jaringan kolusi tersebut dan berharap akan terjadinya pengkhianatan terhadap kolusi tersebut sehingga dapat di bukalah kecurangan tersebut.

Kendala yang lainnya ialah audit investigasi ini hanyalah sebagai alat pengantar bukanlah alat pemutus. Adapun alurnya adalah setelah adanya permintaan dari instansi yang berwenang maka BPK akan melaksanakan pemeriksaan selanjutnya hasilnya akan di serahkan kepada pihak yang meminta dan jika ditemui unsur pidana maka akan di tindak lanjuti oleh polisi dan kejaksaan dan akhirnya barulah di putuskan oleh pengadilan. Maka walaupun dari hasil audit investigasi yang di lakukan oleh BPK di temui unsur merugikan negara tetapi jika pihak-pihak yang tidak berkenan melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi keputusan baik yang diambil oleh pihak kepolisian, kejaksaan atau pengadilan maka hasil audit investigasi tersebut menjadi tidak berarti.

Oleh karena itu dalam hal ini BPK dengan alatnya audit investigasi tidaklah dapat sendirian dalam memberantas korupsi yang terjadi di negara ini melainkan melalui dukungan banyak pihak termasuk masyarakat dimana dengan

serta merta bisa melaporkan kecurangan-kecurangan yang ditemuinya kepada instansi-instansi yang terkait, serta keinginan kuat dari kita semua untuk melaksanakannya.

Segala sesuatu di dunia ini pasti punya manfaatnya begitu pula dengan audit investigasi ini. Adapun manfaatnya yang pertama ialah mengungkapkan kecurangan-kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sehingga mampu mewujudkan cita-cita kita semua agar negara kita menjadi negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan amanat reformasi yang di usung oleh mahasiswa pada tahun 1998.

Adapun manfaat yang lainnya ialah mampu membuat takut atau shock therapy bagi para calon pelaku tindakan korupsi lainnya karena mereka bisa sewaktu-waktu diperiksa oleh BPK kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan. Serta membuat jera para pelaku korupsi sehingga mereka tidak mengulangi lagi tindakan yang telah mereka lakukan di kemudian hari.

Dan dampak besar lainnya ialah menyelamatkan uang negara yang akan di korupsi oleh para oknum-oknum tersebut sehingga uang tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk melakukan pembangunan dan melayani kebutuhan masyarakat.

Dari hal tersebutlah maka penulis mencoba melakukan penelitian ini dan mengambil judul “ *Peranan Audit Investigasi Sebagai Alat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Rangka Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Government)*.”

1.2 Perumusan Masalah

Melihat dari pemaparan tentang latar belakang di atas maka penulis mencoba mengangkat suatu permasalahan walaupun sebenarnya bukan suatu masalah melainkan hanya keinginan tahun dari penulis mengenai hal ini yaitu *seberapa besar peranan audit investigasi sebagai alat dari badan pemeriksa keuangan (BPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi yang sesuai dengan UU No.31 Tahun 1999 untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean government)*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mencoba mengetahui seberapa besarnya peranan yang dimiliki oleh audit investigasi sebagai alat yang dimiliki oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) yang merupakan salah satu auditor negara untuk memberantas tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Menambah pengetahuan mengenai audit investigasi baik bagi penulis sendiri dan juga untuk pembaca.
2. Menambah khasanah penelitian di bidang pemeriksaan akuntansi atau auditing.

3. Dapat ditindaklanjuti atau dikembangkan oleh peneliti-peneliti berikutnya.

1.5 Kerangka Teoritis

Berhubung dalam tulisan ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok, yaitu audit investigasi, badan pemeriksa keuangan, dan tindak pidana korupsi maka kerangka teoritis mengenai ketiga komponen tersebut.

Adapun mengenai audit investigasi landasan teori yang dipakai antara lain, pengertian umum dan khusus, tata cara audit investigasi, prosedur audit investigasi, bentuk laporan audit investigasi dan siapa yang berhak melakukan audit investigasi.

Sedangkan mengenai badan pemeriksa keuangan landasan teori yang dipakai antara lain, mengenai kedudukan BPK dalam struktur pemerintahan, fungsi dari BPK, tugas dan wewenang dari BPK.

Sedangkan untuk tindak pidana korupsi landasan teori yang dipakai ialah berasal dari undang-undang yang ada, peraturan pemerintah mengenai tindak pidana korupsi, yang mengenai definisi korupsi, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, dan hal-hal yang terkait lainnya.

Serta di tambah beberapa pengertian dan ciri terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih atau clean government.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian yaitu studi pustaka dimana penulis mengumpulkan berbagai literatur-literatur dari berbagai bahan bacaan yang akan mendukung terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah semua literatur tersebut dipaparkan maka penulis akan menganalisisnya sesuai dengan permasalahan yang diangkat setelah itu baru diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini. Adapun metode analisis penelitian dengan metode *deduktif* yaitu dari umum ke khusus.

Adapun parameter untuk menilai seberapa besar peranan audit investigasi sebagai alat BPK dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good and clean government*) ialah dengan melihat pada bagian mana audit investigasi ini berada dan kontribusinya pada suatu proses penanganan tindak pidana korupsi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing bab membuat penjelasan tertentu. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan : Mengenai hal-hal tentang penelitian ini sendiri, seperti latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

Bab II

Landasan Teori : Mengenai landasan-landasan teoritis yang dipakai dan di jadikan dasar dalam melakukan penelitian ini.

Bab III

Analisa : Mengenai analisa pembahasan dari permasalahan yang ada.

Bab IV

Kesimpulan & Saran : Mengenai kesimpulan yang diambil setelah dilakukannya penelitian ini dan saran-saran yang akan dikemukakan atas hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Danoeprawiro, Dargono Ir, *Good Governance*, www.pu.go.id
- Hamzah, Andi. Prof. Dr. Jur, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Kuntadi, Cris, SE, MM, BAP, Ak, *Akuntansi, Auditing, dan Audit Investigasi*, Pelatihan Khusus Pendidikan Advokat, FH Unsri, September 2005
- Noeha, Dasriel Adnan, *Audit Investigasi, Bukan Sekedar Audit*, 2 Juni 2005, www.kompas.com
- Salman, Khairiansyah, SE, *Investigasi Audit atas Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Pemeriksa No.82 Oktober-November 2001, www.bpk.go.id
- _____, *Audit Investigasi: Metode Efektif Dalam Pengungkapan Kecurangan*, workshop IAI Palembang, 2005
- Syafi'i, Imam. *Memahami Perbedaan Dasar Hukum Audit Investigasi dan Audit Forensik*, Majalah Pemeriksa No.84 April 2002, www.bpk.go.id
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi memberantas Korupsi . Elemen Sistem Integritas Masyarakat*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Widodo, Joko, 2001. *Good Governance. Telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Sidoarjo, Insan Cendekia
- Evaluasi Setahun Pemerintahan SBY-Kalla, Indonesian Corruption Watch. www.antikorupsi.org
- Rancangan Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. www.bappenas.go.id
- Seminar Mengenai Audit Investigasi kerjasama PT PUSRI dengan KAP Mucharam dan rekan, Palembang
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ketiga
- Undang-undang No.5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara

www.bpkp.go.id

www.detik.com

www.fwi.com

www.kpk.go.id

www.liputan6.com

www.republika.co.id